

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak merek memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk sebagai pemegang hak merek terdaftar serta akibat hukum bagi PT Pisma Abadi Jaya yang melakukan pelanggaran merek “Gajah Duduk”, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk diberikan melalui sistem *first-to-file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar. Perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif. Dalam perkara ini, PT Pisma Abadi Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran merek berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akibat Hukum yang timbul meliputi pidana penjara, denda, serta kemungkinan gugatan ganti rugi secara perdata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perlindungan HKI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak merek terdaftar.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Merek, Gajah Duduk.

ABSTRACT

The protection of Intellectual Property Rights (IPR), particularly trademark rights, plays a crucial role in ensuring legal certainty and safeguarding business actors from unfair competition practices. This study aims to analyze the forms of legal protection granted to PT Gajah Duduk as the registered trademark holder and the legal consequences imposed on PT Pisma Abadi Jaya for trademark infringement of the “Gajah Duduk” brand. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results indicate that legal protection for PT Gajah Duduk is provided through the first to file system as regulated under Law on Marks and Geographical Indications Number 20 of 2016, Such protection is preventive and repressive. In this case, PT Pisma Abadi Jaya was legally and convincingly proven guilty of trademark infringement based on a final and binding court decision up to the cassation level at Supreme Court of the Republic of Indonesia. The legal consequences include imprisonment, fines, and potential civil compensation claims.

This study concludes that Indonesia’s trademark protection system has provided legal certainty for registered trademark holders.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trademark, Legal Protection, Trademark Infringement, Gajah Duduk.